BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan yang masyarakat perlukan semakin luas pula kebutuhan masyarakat yang harus di penuhi. Sehingga masyarakat harus berupaya membuat usaha–usaha yang dapat menopang kebutuhan hidupnya. Dengan semakin banyaknya usaha-usaha masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang berkembang, maka penggunaan air semakin besar pula. Sehingga pemerintah membuat peraturan mengenai pajak pemanfaatan air. Hal ini dikarenakan semakin banyak perusahaan semakin besar pula penggunaan air yang dipakai. Hal tersebut dapat berdampak pada lingkungan sekitar.

Berdasarkan ***"Perda Provinsi Jawa Barat Nomor : 6 Tahun 2001 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah tanah dan Air Permukaan".*** Dalam hal ini diperlukan pemahaman dalam pelaksanaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dimana yang dimaksud dengan Air Bawah Tanah yaitu semua air yang yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah,termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan Air Permukaan yaitu air yang berada diatas permukaan Bumi, tidak termasuk air laut.

Obyek pajak dalam Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :

1. Pengambilan Air Bawah tanah dan atau Air Permukaan
2. Pemanfaatan Bawah tanah dan atau Air Permukaan
3. Pengambilan dan pemanfaatan Bawah tanah dan atau Air Permukaan

Dalam hal ini ada beberapa pengecualian bagi obyek pajak yaitu:

1. Pengambilan dan pemanfaatan Bawah tanah dan atau Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
2. Pengambilan dan pemanfaatan Bawah tanah dan atau Air Permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
3. Pengambilan dan pemanfaatan Bawah tanah dan atau Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
4. Pengambilan air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Sedangkan subyek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan. Dan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan. Serta yang bertanggunng jawab atas pembayaran pajak ini yaitu untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya,

sedangkan untuk badan yaitu pengurus atau kkuasanya. Tak ketinggalan dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Perolehan Air.

Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dengan tujuan yaitu adanya pengendalian akan pemanfaatan air, agar ketersediaan air tetap terpelihara dan terpenuhinya berbagai kepentingan sesuai dengan fungsi air berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin membantu merancang Sistem Informasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di UPPD Provinsi Wilayah XXV Sumedang dan mengambil judul laporan kerja praktek: " **SISTEM PENGELOLAAN PAJAK AIR DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) PROVINSI WILAYAH XXV SUMEDANG**".

2.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang timbul pada Dinas Pendapatan UPPD Propinsi Wilayah XXV (Sumedang) antara lain :

a. Data wajib pajak dicatat pada buku daftar wajib pajak, dimana buku daftar wajib pajak tersebut berbentuk buku besar, sehingga dalam pencarian data wajib pajak memerlukan waktu yang cukup lama.
b. SKPD yang telah ditetapkan dan SPTPD disimpan menjadi arsip dalam ruangan arsip, sehingga untuk pencarian data SPTPD dan SKPD kemudian

hari memerlukan yang cukup lama. Serta SKPD yang telah ditetapkan dicatat pada buku produksi penetapan.

c. Proses perhitungan besar ketetapan pajak air dan dena masih menggunakan perhitungan manual, sehingga kemungkinan terjadi kesalah perhitungan besar ketetapan pajak air dan denda tersebut.

d. Data buku penerimaan pembayaran harus dicatat dan dibuat rekapitulasi dahulu sebelum dibuat laporan penerimaan pembayaran, sehingga pembuatan laporan menjadi kurang efisien, karena data bukti penerimaan harus dicatat dalam periode perhari dan perbulan dengan data yang sama sebelum dibuat laporan penerimaan pembayaran.

b. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana system pelayanan dalam pembayaran dan penagihan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang berjalan pada UPPD Provinsi Wilayah XXV Sumedang
2. Bagaimana system pelayanan dalam pembayaran dan penagihan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang diusulkan pada UPPD Provinsi Wilayah XXV Sumedang
3. Bagaimana system komputerisasi pada UPPD Provinsi Wilayah XXV Sumedang

2.3. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Adapun maksud dari penulisan laporan kerja praktek inni untuk memenuhi syarat mata kuliah kerja praktek program Strata I Jurusan Manajemen

Informatika. Dan juga diharapkan penulis mendapatkan pengalaman praktek kerja di dunia kerja yang sesungguhnya.

Sedangkan tujuan laporan ini antara lain adalah:

1. Untk mengetahui prosedur perancangaan Sistem informasi Pembayaran Pajak Air Permukaan pada UPPD Provinsi Wilayah XXV Sumedang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dan dihadapi oleh UPPD Provinsi Wilayah XXV Sumedang dalam Pembayaran Pajak Air Permukaan.

2.4. Batasan Masalah

Agar penelitian dan penyusunan sistem informasi ini dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan batasan permasalahan.

1. Sistem informasi yang akan dikembangkan menggunakan metode pendekatan terstuktur.
2. Program aplikasi yang akan dibuat, hanya digunakan untuk pendaftaran wajib, perhitungan besaran pajak air dan denda, serta pembuatan laporan penetapan SKPD dan laporan penerimaan pembayaran.
3. Program aplikasi yang akan dikembangkan digunakan pada bagian pembukuan, bagian penetapan dan bendahara pada dinas pendapatan UPPD Propinsi wilayah XXV (Sumedang).
4. Pengembangan sistem yang dilakukan sampai pada tahap pengkodean.

2.5. Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

Lokasi tempat penulis melaksanakan kerja praktek adalah di UPPD Provinsi Wilayah XXV Sumedang yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dhien No. 114 Sumedang. Adapun pelaksananya dilakukan mulai tanggal 2 Agustus 2010 sampai dengan 14 agustus 2010 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan waktu pelaksanaannya adalah dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00. waktu istirahat dari pukul 12.00 samapi dengan pukul 13.00.

Tabel 1.1.

Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

No	Aktivitas	Waktu (Bulan Agustus Tahun 2010)										
		2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1	Laporan Ben26											
2	Laporan DHS											
3	Mengarsipkan Laporan											
4	Menginputkan Ben26											
5	Menginputkan Data Pegawai											
6	Pendaftaran											
7	Penetapan											
8	Loksus											
9	Pembayaran											
10	Penyerahan STNK											
11	Pengawasan (control CPU)											

2.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, maksud dan tujuan pelaksanaan kerja praktek, system pelaksanaan kerja praktek, lokasi dan waktu dan sistematika penulisan laporan kerja praktek.

BABII LANDASAN TEORI

Bab ini memnjelaskan tentang teori-teori yang relevan dengan masalah kerja praktek. Teori-teori yang diambil umumnya didasarkan pada judul penelitian yang dilakukan.

BAB III PROFIL PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan yang mencakup tinjauan umum perusahaan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja.

BAB IV ANALISIS PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis praktek kerja lapangan harus meliputi atau menjelaskan tentang system yang sedang berjalan dan system yang diusulkan pada perusahaan serta harus memperlihatkan masalah dan pemecahannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti dan saran-saran yang penulis kemukakan untuk instansi / perusahaan tempat kerja praktek.